PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN PURING
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING
2025

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 848 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lamberan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Perencanan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Puring Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Puring Tahun 2025 dirinci program dan kegiatan untuk tahun 2025.

Kebumen, 26 Juni 2025

Camat Puring
Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN PURING

TURISNO, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 197208201994031006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 3
C. Maksud dan Tujuan 4
D. Sistematika Penulisan 5
BAB II 6
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025 6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6
B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring 17
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 18
D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah 20
E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 29
BAB III 31
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 31
B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 32
C. Program Dan Kegiatan 32
BAB IV 37
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 37
A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten. 37
B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 38
BAB V 39
PENUTUP 39

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Program dan Kegiatan Kecamatan Puring Tahun 2025.....6
Tabel 2. 2. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 7
Tabel 2. 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan.....10
Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring.....18
Tabel 2. 5. Review terhadap RKPD Tahun 2025 22
Tabel 2. 6. Prioritas Usulan Pembangunan Tahun 2025 29

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Puring Tahun 2025.....32
Tabel 3. 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Puring Tahun 2025.....35

Tabel 4. 1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten.....37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Kecamatan Puring Kab. Kebumen Tahun 2025
2. Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Puring Tahun 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh Camat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kebumen. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat mengenai sebagaian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kecamatan Puring mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
7. Pelaksanaan pembinaan sosial kemasyarakatan;
8. Pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasi, dan usaha kecil menengah;
9. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan, penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya:
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakanm pemerintah desa/kelurahan;
11. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan, dan rumah tangga kecamatan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja PD. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Kecamatan Puring sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya Kecamatan Puring berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Puring Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Renja PD tersebut disusun dengan berpedoman pada: (i) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (ii) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan (iv) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tahapan-tahapan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan

Perubahan Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Tahun 2021-2026. Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 memuat program, kegiatan, dan target capaian sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Puring.

Perubahan Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan perincian dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026. Maka dari itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam Perubahan Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 harus selaras dan sinkron dengan Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Perubahan Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 digunakan sebagai:

1. Pedoman bagi Kecamatan Puring dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025; dan
2. Dokumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

B. Landasan Hukum

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Puring Tahun 2025 disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen periode tahun 2021-2026 dan Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021-2026. Perubahan Renja PD tersebut dimaksudkan pula sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Puring pada tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Puring Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan/melaksanakan Renstra Kecamatan Puring tahun 2021-2026;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut identifikasi masalah tahun 2023 dan sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan yang mungkin dihadapi tahun 2025;
3. Menjamin optimalnya koordinasi integrasi, singkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Memberikan acuan dan sebagai pengendali serta evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Puring Tahun 2025;
5. Mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Puring tahun sebelumnya (2023).

D. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Puring tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-Isu Penting Penyelengaraan Tugas dan Fungsi
- D. Perangkat Daerah
- E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
- B. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. PENUTUP
- A. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- B. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2025

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja PD Kecamatan Puring merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Kecamatan Puring. Ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja PD Kecamatan Puring Tahun 2025 dapat dilihat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (LK SKPD) Tahun 2025.

Kecamatan Puring, sebagai SKPD di Kabupaten Kebumen, memiliki program dan kegiatan yang mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen tahun 2025, yaitu "peningkatan penerapan *good and clean government*". Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2025 Kecamatan Puring menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan, adapun program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Program dan Kegiatan Kecamatan Puring Tahun 2025

No	Program	No	Kegiatan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun realisasi anggaran pada Kecamatan Puring Triwulan II Tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.581.000	1.665.000	29,83%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000	3.620.000	39,35%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.935.222.000	1.148.195.125	59,33%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.800.700	4.074.699	29,53%
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	800.000	44,44%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	8.400.000	46,67%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.049.000	279.000	6,89%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000	548.000	39,14%
	Penyediaan Bahan/Material	8.099.000	0	0,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.000	740.000	40,00%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.361.000	4.103.000	76,53%
4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.800.000	3.847.000	8,78%
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	5.699.455	31,66%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.390.000	16.024.000	51,05%
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	12.878.000	36,79%
	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	0	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	3.013.000	50,22%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	0	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
7	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.047.000	6.228.000	68,84%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.079.521.000	0	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
8	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**			
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.179.000	0	0,00%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
9	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.045.800	13.628.000	59,13%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	200.000	0	0,00%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.872.000	300.000	16,03%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.395.000	150.000	2,78%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.732.000	1.900.000	16,20%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.947.000	0	0,00%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	62.747.000	42.480.000	67,70%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.695.000	3.650.000	64,09%
Jumlah		**3.411.933.500**	**1.282.222.279**	**38%**

Tabel 2. 3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kecamatan Puring

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Puring) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
A			Unsur Kewilayahan									
A	**1**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
A	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan									
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, RENSTRA 2024)	46 dok.	11 dok.	11 dok.	11 dok	100%	11 dok.	33 dok.	60%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun(Delev, LKPJ, SAKIP, IKJIP)	25 dok.	5 dok.	5 dok.	5 dok.	100%	5 dok.	15 dok.	60%
A	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat									
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dan tamsil	80 orang	16 orang	16 orang	16 orang	100%	16 orang	48 orang	60%
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan administrasi keuangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Puring) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
A	1	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah									60%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitasi pengelolaan arsip	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Puring) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
A	1	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
			Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	15 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	9 unit	60%
A	1	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%
A	1	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan dan peralatan kerja	213 unit	41 unit	43 unit	43 unit	100%	43 unit	127 unit	60%
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	30 Unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	18 unit	60%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Puring) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	120 Unit	24 unit	24 unit	24 unit	100%	24 unit.	72 unit	60%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi	5 Unit	1 unit	0 unit	1 unit	100%	0	2 unit	60%
B	2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
B	2	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan Non Perijinan yang dilaksanakan	25 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	15 jenis	60%
			Pelaksanaan Urusan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	0 keg.	0 keg.	0 keg.	0 keg.	0 keg.	1 keg.	1 keg.	60%
C	**1**		**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**									

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Puring) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
C	1	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undanga Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	20 keg.	4 keg.	4 keg.	4 keg.	100%	4 keg.	12 keg.	60%
D	**1**		**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**									
D	1	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Puring) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan	80 desa	16 desa.	16 desa	16 desa	100%	16 desa	48 desa	60%
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	1 keg	-	-	-	-	-	-	60%
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	5 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	3 keg.	60%
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	10 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	100%	2 dok.	6 dok.	60%
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	5 keg.	1 keg	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	60%
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipasif	10 keg.	2 keg.	2 keg.	2 keg.	100%	2 keg.	6 keg.	60%

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Puring) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
							Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=(10/4)
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, BUMDes, Sosmas)	50 keg.	10 keg.	10 keg.	10 keg.	100%	10 keg.	30 keg.	60%
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2kdes)	10 keg.	2 keg.	2 keg.	2 keg.	100%	2 keg.	6 keg.	60%

B. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Puring mempunyai tugas untuk:

1. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan: dan
2. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:
   a. Perumusan kebijakan teknis ditingkat kecamatan;
   b. Pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
   e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Puring, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Puring dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Kinerja Kecamatan Puring diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang digunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Puring Tahun 2021-2026 sesuai dengan

Perubahan Rencana Strategis yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Puring sesuai indikator dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Puring

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD					Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan			86,34	88,36	90,38	91,40	92,42	85,77	86,60	90,82	91,40	

Sumber : Renstra Kecamatan Puring 2021-2026

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Kecamatan Puring telah menunjukkan tingkat kinerja yang optimal pada tahun 2023. Hal tersebut ditunjukkan oleh tingkat capaian realisasi program dan kegiatan dari Renstra Kecamatan Puring Tahun 2021- 2026. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada periode 2021-2026, terdapat isu-isu strategis dan permasalahan klasik serta harus diselesaikan, adapun isu-isu tersebut antara lain:

1. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Puring yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi sebagai berikut :
   a. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan.
   b. Implementasi pelimpahan kewenangan kepada camat belum semuanya diikuti dengan peraturan atau kebijakan pendukung lainnya sehingga proses pelayanan tidak berjalan efektif.
   c. Belum memadainya kualitas dan kuantitas pelaksana teknis pelayanan PATEN.
   d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PATEN belum optimal.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), adapun permasalahannya sebagai berikut: Dalam penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan ADD dan DD mayoritas Desa masih mengalami keterlambatan pada setiap pelaporannya. Di karenakan masih perlu peningkatan SDM Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan dalam bentuk monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis proses penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD agar tepat waktu dan akuntabel.
3. Pembinaan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Kelembagaan Desa, adapun permasalahanya yaitu:
   a. Masih perlu peningkatan SDM Kepala Desa, Perangkat Desa,

BPD dan Kelembagaan Desa serta peningkatan sarana prasarana yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan efektif dan efisien.

b. Sistem adminitrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintah kurang tertata. Upaya yang dilakukan:
   1) Perlu adanya pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM Perangkat pemerintah desa;
   2) Pengalokasian anggaran desa untuk kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
   3) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

4. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

   Perencanaan dan Penganggaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan penganggaran berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan. Kementrian Dalam Negeri tahun 2019 meluncurkan sistem penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran (SIPD) namun tahun 2021 masih belum dapat diselesaikan. Dengan keluarnya sistem aplikasi diharapkan terjadi sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

5. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal

   Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian, masukan dari hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan perbaikan di OPD;

6. Permasalahan dalam bidang kesehatan

   Stunting menjadi salah satu isu strategis pada era saat ini terutama masing tingginya kasus angka stunting pada masyarakat. Salah satu indikator pembangunan di bidang kesehatan adalah program cegah stunting dengan gizi seimbang. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan stunting adalah ketersediaan dan keamanan pangan. Pencegahan stunting yang dilakukan kecamatan salah satunya yaitu bekerjasama dengan Pukesmas Puring dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan sumber daya pangan untuk memenuhi gizi anak-anak. Pemenuhan gizi anak-anak dengan pemberian PMT, MP-ASI, pemberian imunisasi, dan pendampingan tumbuh kembang anak. Selain dengan pemenuhan gizi anak–anak, pencegahan stunting juga dilakukan dengan pengawalan dan pendampingan dari calon pengantin, ibu hamil sampai melahirkan. Namun masih terdapat kendala diantaranya jumlah kader dan peralatan yang masih kurang, perhatian terhadap kader serta adanya pengukuran tinggi

badan (TB) dan pelaporan yang kurang tepat dari beberapa desa. Peningkatan kapasitas bagi kader juga sangat diperlukan.

7. SDG's untuk pelaksanaan pemutahiran ID berbasis SDG's di Kecamatan Puring sudah dilaksanakan setiap tahun. Progresnya untuk proses pendataan manual sudah selesai dilakukan di 23 Desa di Kecamatan Puring, sedangkan input ke Aplikasi SGD's sedang dalam proses sambil menunggu aplikasi bisa digunakan lagi. Musyawarah Desa penetapan hasil pendataan SGD's sudah dilakukan di 23 Desa. Adapun kendala yang dihadapi:
   a. Aplikasi yang *eror/troubel* sehingga untuk input hasil belum maksimal dan belum terselesaikan sampai saat ini.
   b. Keterbukaan informasi terkait penghasilan, sebagian besar responden enggan menyampaikan sesuai kenyataan.
8. Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dibagi menjadi dua bagian, pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya dalam penanggulangan kemiskinan tersebut dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan kepada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi Program Keluarga Harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai dan bantuan pangan non tunai. Dari segi kesehatan, pemerintah juga memberikan bantuan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. Namun masih ada data yang tidak update, seperti penerima bantuan meninggal namun masih terdaftar sehingga menyulitkan dalam penyaluran bantuan.

Adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Puring dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengganggu kinerja pelayanan Kecamatan Puring jika tidak mendapatkan penyelesaian dan diatasi dengan tepat yang pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi Kecamatan Puring dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen.

D. Review Usulan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Puring merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui

berbagai kegiatan. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Puring Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Puring.

Tahun 2025 Kecamatan Puring masih menggunakan nomenklatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan pada tahun 2025 Renja Kecamatan Puring menggunakan nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020, sehingga penyusunan Renja tahun 2025 dilakukan sinkronisasi program. Sinkronisasi ini tetap mempertahankan target capaian renstra Kecamatan Puring.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 5. Review terhadap RKPD Tahun 2025

Pagu RKPD Murni						Pagu Perubahan				
Kode	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01	**KECAMATAN PURING**				**3.353.957.829**	**KECAMATAN PURING**				**2.506.899.500**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	100%	**2.013.202.829**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja**	100%	**2.335.039.700**
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puring	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100%	**15.700.000**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puring	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100%	**14.781.000**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dok	**6.200.000**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	**5.581.000**
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 lap	**9.500.000**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 lap	**9.200.000**
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	**1.792.012.829**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	**2.120.609.700**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Puring	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	**1.778.212.829**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Puring	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	**2.106.809.000**

Pagu RKPD Murni						Pagu Perubahan				
Kode	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	**13.800.000**	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 dok	**13.800.700**
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	**46.558.000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	100 %	**40.559.000**
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	**2.000.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	**1.800.000**
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	**20.000.000**	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	**18.000.000**
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	**4.500.000**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	**4.049.000**
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	**1.400.000**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dok	**1.400.000**
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	**9.000.000**	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Puring	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	**8.099.000**
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 lap	**3.700.000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 lap	**1.850.000**
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dok	**5.958.000**	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dok	**5.361.000**

Pagu RKPD Murni						Pagu Perubahan				
Kode	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**43.800.000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	**43.800.000**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Puring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	**43.800.000**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Puring	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	**43.800.000**
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puring	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	**48.132.000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	**48.290.000**
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	**1.000.000**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	**1.000.000**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lap	**18.000.000**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lap	**18.000.000**
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	**29.132.000**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	**29.290.000**
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puring	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	**67.000.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Puring	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	**67.000.000**

Pagu RKPD Murni						Pagu Perubahan				
Kode	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Puring	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	**35.000.000**	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Puring	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	**35.000.000**
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Puring	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	**1.000.000**	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Puring	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	**1.000.000**
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Puring	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	**6.000.000**	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Puring	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	**6.000.000**
7.01.01.2.09.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Puring	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	**25.000.000**	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Puring	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	**25.000.000**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	100 %	**1.147.055.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	100 %	**14.047.000**
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puring	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	**1.147.055.000**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Puring	Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	**14.047.000**
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 lap	**10.000.000**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 lap	**9.047.000**
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 lap	**1.137.055.000**	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 lap	**5.000.000**

Pagu RKPD Murni						Pagu Perubahan				
Kode	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI**	4 keg	**20.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI**	4 keg	**18.179.000**
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	4 keg	**20.000.000**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	4 keg	**18.179.000**
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Puring	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	**20.000.000**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Puring	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	**18.179.000**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan**	100 %	**173.700.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan**	100 %	**139.633.800**

Pagu RKPD Murni						Pagu Perubahan				
Kode	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puring	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100 %	**173.700.000**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Puring	Prosentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	100 %	**139.633.800**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dok	**28.500.000**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dok	**0**
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	**0**	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 dok	**23.045.800**
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dok	**200.000**	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dok	**200.000**
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dok	**2.000.000**	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 dok	**1.872.000**
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 dok	**7.000.000**	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 dok	**5.395.000**

Pagu RKPD Murni						Pagu Perubahan				
Kode	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**	**Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan**	**Target 2025**	**Pagu Indikatif (Rp)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dok	**15.000.000**	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dok	**11.732.000**
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 dok	**33.000.000**	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5 dok	**28.947.000**
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 dok	**78.000.000**	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Puring	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 dok	**62.747.000**
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 lap	**10.000.000**	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Puring	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 lap	**5.695.000**

E. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Puring diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan/desa (Musrenbangkel/des) hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023 (Musrenbangcam). Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan kelurahan/desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan musrembang, terdapat 6 (enam) usulan dari setiap desa di Kecamatan Puring untuk tahun 2025 diantaranya pembangunan jalan, irigasi, pelatihan-pelatihan, perbaikan gizi masyarakat, serta pembangunan sarana dan prasaran lainnya dengan jumlah total usulan yaitu 138 (seratus tiga puluh delapan), adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran Renja ini. Dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2023 ditetapkan 10 (sepuluh) prioritas, adapun 10 prioritas tersebut dapat di lihat pada table 2.6.

Tabel 2. 6. Prioritas Usulan Pembangunan Tahun 2025

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	DESA	SKPD TUJUAN
1	Pengaspalan Jalan Menuju Standar	Kondisi jalan rusak	Jln. Laut Bopong RT 05 RW 01	Surorejan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi tanah (JIAT)	Kekeringan pada musim tanam karena saluran irigasi belum memadai	Desa Purwosari	Purwosari	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Peningkatan pelayanan kesehatan	Gedung PKD belum ada	Desa Arjowinangun	Arjowinangun	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Pengadaan Cultivator *Kecil*	Meningkat hasil Pertanian	KWT "Banyu Mili" Desa Krandegan	Krandegan	Dinas Pertanian dan Pangan
5	Rehab Tersier	Jaringan Tersier Rusak	Sawah Gapoktan "Subur Makmur Poktan "Makmur" Poktan "Sri Makmur"	Purwoharjo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	DESA	SKPD TUJUAN
6	Traffic Light Per Kaki Simpang 4 (Tenaga Surya)	Masih Perlu Penerangan Di jalan Kabupaten Desa Banjarejo	Desa Banjarejo	Banjarejo	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
7	Rehabilitasi dan pemeliharaan Saluran Irigasi (Jitut)	Aliran air kurang lancar sehingga sawah pertanian tidak terairi dengan maksimal	Desa Pesuruhan	Pesuruhan	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Traffic Light Per Kaki Simpang 3	Sering terjadi kecelakaan karena tindak ada rambu rambu lalulintas	Pertigaan Pasar Desa Weton Wetan	Weton Wetan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
9	Talud Saluran Irigasi	Belum ada saluran induk	Sungai Blado 1	Srusuh Jurutengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Normalisasi Saluran Irigasi	Beberapa titik Saluran sudah dangkal	RW 04 Desa Sidodadi	Sidodadi	Dinas Pertanian dan Pangan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi dan misi Kecamatan Puring berpedoman dan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026. Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat". Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati serta hasil analisa isu- isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dapat diuraikan bahwa isi-isu strategis yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puring adalah: "Belum optimalnya implementasi *Clean and Good Governance*."

Semua program dan kegiatan di Kecamatan Puring dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pegawai adalah sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Kebumen dan berperan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program dan kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Puring yang mandiri, sejahtera, dan berakhlak mulia peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puring adalah Misi 1 (satu), yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov dan open gov*" yang berintegrasi dengan program-program unggulan yang meliputi:

1. GO-LAK

   Jemput ke rumah layanan Administrasi Kependudukan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan jemput bola ke rumah "ora antri, ora suwe, cepet dadi".

2. Satu Data Untuk Semua

   Data Kependudukan terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan.

3. Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)

   Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; dan

4. Festival Anggaran

   Festival anggaran merupakan bentuk komitmen peningkatan transparasi penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan bersama-sama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Melalui Festival Anggaran pemerintah Kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk

turut serta mengawasi penggunaan anggaran.

B. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Puring Tahun 2025-2029, maka Tujuan dari Kecamatan Puring sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen adalah untuk mencapai misi *:"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi"*. Selain memperhatikan kebijakan Prioritas tahun 2025, Kecamatan Puring juga memperhatikan kebijakan dari pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Puring tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Puring Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Puring	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Kecamatan Puring)	90,30

C. Program Dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan
   a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah

      Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Puring secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala daerah. Program dan kegiatan tersebut juga merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

      Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Puring adalah sebagai berikut:

      1) Adanya inovasi tempat pelayanan yang diwujudkan melalui *Gender Responsive Public Service* (GRPS) Puring sehingga memberikan pelayanan lebih optimal;
      2) Transparansi informasi melalui media elektronik dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;

3) Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4) Kepemimpinan berjalan efektif dan efisien sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan optimal;
5) Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
6) Masyarakat terlibat dalam pemberdayaan melalui kegiatan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa dan program kegiatan pembangunan melalui padat karya terpadu.

b. Pencapaian SDGs

Prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Tujuan dan sasaran SDGs dijadikan acuan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Puring dalam Renja PD Tahun 2025 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitasnya.

c. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Indonesia bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upaya untuk penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Puring. Pada Tahun 2024, Kecamatan Puring merencanakan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dalam Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes dan Sembako) dan kegiatan belanja per makanan penduduk lansia miskin.

Strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang

dilaksanakan oleh pemerintah dibagi menjadi dua bagian, Pertama melindungi keluarga dan masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan yang kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi dan upaya tersebut selanjutnya dituangkan dalam beberapa program yang diarahkan pada penduduk miskin yaitu penyediaan bahan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Upaya pemerintah memiliki beberapa sistem yaitu perlindungan sosial, identifikasi dan penilaian penerima manfaat melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dalam mengurangi dampak sosial ekonomi di masa pandemi, program keluarga harapan (PKH), memperluas cakupan program sembako serta menyalurkan program bantuan tunai maupun BLT yang bersumber dari Dana Desa.

d. Penanggulangan Stunting

Di Kecamatan Puring masih ditemukan kasus gizi kurang, gizi buruk dan kasus stunting. Penanganan kasus tersebut tidak bisa dilakukan sendirian. Pemerintah daerah membutuhkan partisipasi dari masyarakat dan instansi lain untuk mengatasi persoalan tersebut. Adapun upaya dari pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Puring dalam rangka upaya penanggulangan stunting dengan melakukan koordinasi dan melaksanakan percepatan penanggulangan stunting dengan pemerintah desa dan Puskesmas Puring.

e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan tahun 2023, Kecamatan Puring mengusung Program Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Puring.

Kecamatan Puring memiliki banyak potensi ekonomi baik yang bersumber dari potensi pasar lokal, hasil bumi dari pertanian masyarakat, dan sumberdaya wisata alam yang tersebar diseluruh sudut wilayah (contohnya Pantai Silumut, Pantai Kembar Terpadu dll). Bila seluruh sumber daya ini mempu dikelola secara maksimal maka niscaya akan mendorong pesat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa-desa di Puring dapat menuju kepada konsep Desa Mandiri.

f. Pengembangan Kewilayahan

Pengembangan infrastruktur wilayah di Kecamatan Puring yang mendukung percepatan peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan dan pembangunan jalan lintas utara. Jalan tersebut merupakan jalan antar kabupaten sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Puring.

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Puring tahun 2025 adalah 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan di dalamnya.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Puring sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Puring, yang meliputi semua desa yang ada di Kecamatan Puring dan juga Kantor Kecamatan Puring sendiri, serta beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Kebumen.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Total kebutuhan dana /pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. Rp. 2.506.899.500,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Dalam penyusunan Perubahan Renja PD Kecamatan Puring tahun 2025 memperhatikan penganggaran sesuai Renstra Kecamatan tahun 2021-2026. Setelah dilakukan pemetaan Renja Kecamatan Puring tahun 2025, terdapat 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan serta 30 (tiga puluh) sub kegiatan, dengan uraian yang ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Puring Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
		Evaluasi kinerja perangkat daerah
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang bangunan kantor
		Penyediaan bahan logistik kantor
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyediaan bahan/material
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	Penyediaan jasa	Penyediaan jasa surat menyurat

	penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pemeliharaan mebel
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintaha n Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
		Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa
		Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
		Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
		Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026, yaitu *"Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat"* ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi".

A. Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten.

Prioritas pendanaan di Kecamatan Puring tahun 2025 memperhatikan Renstra Kecamatan Puring tahun 2021-2026, Capaian RKPD tahun 2023 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Puring yang mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 1. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/ Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Ket.
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.335.039.700**	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.781.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.120.609.700	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.559.000	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.800.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.290.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	

7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**14.047.000**	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.047.000	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**18.179.000**	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.179.000	
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**139.633.800**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.633.800	
Jumlah Pagu		**2.506.899.500**	

B. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Puring Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat dalam lampiran 1 (satu) yang terdiri dari 4 program, 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan total pagu 2.506.899.500,-.

BAB V
PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) da Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Camat Puring
Kabupaten Kebumen

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING

TURISNO, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 197208201994031006

LAMPIRAN